

Manajemen Tata Kelola Administrasi Pekerjaan Pemeliharaan Fasilitas di Lingkungan Pelabuhan Benoa, Badung - Bali

Rika Puspita¹, Ni Ketut Arniti², Dewi Sucitawathi Pinatih³, Ni Putu Bayu Widhi Antari⁴

Universitas Pendidikan Nasional, Indonesia
ketutarniti@undiknas.ac.id², iga_dewi@undiknas.ac.id³,
bayuwidhiantari@undiknas.ac.id⁴
E-mail Korespondensi : rikapuspita2608@gmail.com

Submitted: 11th Nov 2025 | **Edited:** 27th Nov 2025 | **Issued:** 01st Dec 2025

Cited on: Puspita, R., Arniti, N. K., Pinatih, D. S., & Antari, N. P. B. W. (2025). Manajemen Tata Kelola Administrasi Pekerjaan Pemeliharaan Fasilitas di Lingkungan Pelabuhan Benoa, Badung - Bali. *INOVASI: Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen*, 12(2), 495-503.

Abstract

The effectiveness of port facility maintenance is closely related to the quality of administrative governance that supports planning, implementation, and reporting processes. At Benoa Port, several administrative issues remain, including delays in work reporting, inconsistencies in documentation formats between work units, and the limited use of integrated digital systems. This study aims to analyze the administrative governance of facility maintenance at Benoa Port, Badung, Bali, focusing on the management mechanism as well as supporting and inhibiting factors in its implementation. This research employed a qualitative approach, with data collected through observation, in-depth interviews, and documentation. Informants were purposively selected from managers, junior managers, and technical and administrative staff within the Engineering Division of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Sub-Regional Bali Nusra. Data analysis was conducted using an interactive model involving data reduction, data display, and conclusion drawing. The results indicate that administrative governance of facility maintenance at Benoa Port has generally followed established standard operating procedures, covering planning, execution, supervision, and reporting stages. However, its implementation has not yet been optimal due to administrative inefficiencies and limited digital integration. Nevertheless, strong organizational commitment, adequate human resources, and staff awareness support the continuity of maintenance activities. Strengthening integrated administrative systems and inter-unit coordination is therefore essential to improve effectiveness, efficiency, and accountability.

Keywords: Administrative Governance; Facility Maintenance; Port Management; Public Administration; Good Governance

Abstrak

Efektivitas pemeliharaan fasilitas pelabuhan sangat ditentukan oleh kualitas tata kelola administrasi yang mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pekerjaan. Di Pelabuhan Benoa, masih ditemukan permasalahan administratif, seperti keterlambatan pelaporan pekerjaan, perbedaan format dokumen antarunit kerja, serta pemanfaatan sistem digital yang belum

terintegrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tata kelola administrasi pekerjaan pemeliharaan fasilitas di Pelabuhan Benoa, Badung, Bali, dengan menelaah mekanisme pengelolaan serta faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Informan dipilih secara purposive dari unsur manajer, junior manajer, serta staf teknis dan administrasi pada Divisi Teknik PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Sub Regional Bali Nusra. Analisis data dilakukan secara interaktif melalui tahap reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola administrasi pemeliharaan fasilitas telah dilaksanakan sesuai standar operasional prosedur, namun belum optimal akibat keterbatasan sistem administrasi dan integrasi data. Meskipun demikian, komitmen organisasi dan ketersediaan sumber daya manusia menjadi faktor utama pendukung keberlanjutan pemeliharaan fasilitas.

Kata Kunci : Tata Kelola Administrasi; Pemeliharaan Fasilitas; Pelabuhan; Administrasi Publik; Good Governance

PENDAHULUAN

Pelabuhan merupakan simpul strategis dalam sistem transportasi dan perekonomian nasional yang menuntut pengelolaan fasilitas secara berkelanjutan, efektif, dan akuntabel. Keandalan fasilitas pelabuhan sangat dipengaruhi oleh kegiatan pemeliharaan yang terencana dan terdokumentasi dengan baik. Dalam konteks administrasi publik, pemeliharaan fasilitas tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis, tetapi juga dengan tata kelola administrasi yang mengatur perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta pelaporan kegiatan secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan (Sulistyarini, 2023).

Perkembangan digitalisasi administrasi publik turut mendorong perubahan dalam pengelolaan pekerjaan pemeliharaan fasilitas. Sistem administrasi yang terintegrasi dinilai mampu meningkatkan transparansi, mempercepat proses pelaporan, serta memperkuat akuntabilitas organisasi publik (Hendrawan & Fitriani, 2024). Dalam pengelolaan pelabuhan, digitalisasi administrasi menjadi semakin penting karena melibatkan koordinasi lintas unit kerja dan kebutuhan dokumentasi yang kompleks. Bhakty dkk. (2024) menegaskan bahwa sistem informasi yang terkelola dengan baik berperan signifikan dalam meningkatkan kualitas pengawasan dan pertanggungjawaban organisasi pelabuhan.

Pelabuhan Benoa sebagai salah satu pelabuhan utama di Bali memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas logistik, pariwisata, dan perekonomian regional. Tingginya intensitas aktivitas tersebut menuntut ketersediaan fasilitas pelabuhan yang selalu dalam kondisi layak operasi. Oleh karena itu, kegiatan pemeliharaan fasilitas menjadi kebutuhan yang tidak terpisahkan dari operasional pelabuhan. Namun, dalam praktiknya, pengelolaan administrasi pemeliharaan fasilitas di Pelabuhan Benoa masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti keterlambatan penyampaian laporan pekerjaan, perbedaan format administrasi antarunit kerja, serta penerapan sistem digital yang belum terintegrasi secara menyeluruh.

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa tata kelola administrasi pemeliharaan fasilitas belum sepenuhnya berjalan sesuai prinsip efektivitas,

efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Padahal, prinsip-prinsip good governance merupakan fondasi penting dalam penyelenggaraan administrasi publik, termasuk di sektor kepelabuhanan (Rahman & Sari, 2023). Ketidakterpaduan sistem administrasi berpotensi menghambat koordinasi antarunit, menyulitkan proses evaluasi, serta mengurangi kualitas pengambilan keputusan manajerial.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas tata kelola pelabuhan dari berbagai perspektif, seperti koordinasi kelembagaan, pengelolaan arsip, dan pemanfaatan sistem informasi (Riyadi et al., 2021; Dimisyqiyani, 2024). Penelitian lain juga menyoroti pentingnya dokumentasi dan pelaporan dalam mendukung efektivitas pengelolaan fasilitas publik (Amalia, 2025; Gunawan & Lestari, 2022). Namun demikian, kajian yang secara khusus mengulas tata kelola administrasi pekerjaan pemeliharaan fasilitas pelabuhan, terutama dari aspek mekanisme administratif, faktor pendukung dan penghambat, serta praktik koordinasi antarunit kerja, masih relatif terbatas.

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat celah penelitian yang perlu diisi untuk memahami secara lebih mendalam bagaimana tata kelola administrasi pemeliharaan fasilitas dijalankan dalam praktik di lingkungan pelabuhan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tata kelola administrasi pekerjaan pemeliharaan fasilitas di Pelabuhan Benoa, Badung, Bali, dengan fokus pada mekanisme pengelolaan administrasi serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaannya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi pengelola pelabuhan dalam memperbaiki sistem administrasi pemeliharaan, sekaligus memperkaya kajian akademik di bidang administrasi publik dan tata kelola pelabuhan.

LANDASAN TEORI

Tata Kelola Administrasi dalam Administrasi Publik

Tata kelola administrasi merupakan kerangka pengaturan yang mengarahkan bagaimana suatu organisasi publik menjalankan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan kegiatan secara sistematis. Dalam perspektif administrasi publik, tata kelola administrasi tidak hanya dipahami sebagai aktivitas pencatatan, tetapi sebagai instrumen pengendalian organisasi untuk menjamin efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan layanan publik (Dwiyanto, 2020). Administrasi yang tertata dengan baik memungkinkan organisasi publik menjalankan tugasnya secara konsisten sesuai dengan standar operasional dan ketentuan yang berlaku.

Pada sektor kepelabuhanan, tata kelola administrasi memiliki karakteristik yang kompleks karena melibatkan berbagai unit kerja, kepentingan operasional, serta tuntutan regulasi yang ketat. Oleh karena itu, sistem administrasi di pelabuhan harus mampu mengakomodasi kebutuhan koordinasi lintas unit serta mendukung proses pengambilan keputusan berbasis data (Yusuf & Prabowo, 2021).

Manajemen Pemeliharaan Fasilitas Publik

Pemeliharaan fasilitas publik merupakan rangkaian kegiatan yang bertujuan menjaga kondisi fisik sarana dan prasarana agar tetap berfungsi secara optimal dan berkelanjutan. Menurut Mardiasmo (2021), manajemen

pemeliharaan fasilitas yang efektif tidak dapat dipisahkan dari sistem administrasi yang mendukung pencatatan kondisi fasilitas, perencanaan pekerjaan, pelaksanaan teknis, serta evaluasi hasil pemeliharaan. Tanpa dukungan administrasi yang memadai, kegiatan pemeliharaan berpotensi tidak terdokumentasi dengan baik dan sulit dipertanggungjawabkan.

Dalam konteks pelabuhan, pemeliharaan fasilitas memiliki dampak langsung terhadap keselamatan operasional, kelancaran arus barang dan penumpang, serta perlindungan lingkungan. Oleh karena itu, pengelolaan pemeliharaan fasilitas pelabuhan membutuhkan sistem administrasi yang mampu menjamin ketepatan waktu, ketepatan prosedur, dan ketertelusuran setiap kegiatan pemeliharaan (Widodo & Kurniawan, 2020).

Prinsip Good Governance dalam Tata Kelola Pelabuhan

Good governance merupakan prinsip dasar dalam penyelenggaraan administrasi publik yang menekankan pada transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan partisipasi. Penerapan prinsip-prinsip ini menjadi semakin penting dalam pengelolaan infrastruktur strategis seperti pelabuhan (Sutopo, 2019). Transparansi administrasi memungkinkan seluruh proses pemeliharaan fasilitas dapat dipantau dan dievaluasi, sementara akuntabilitas memastikan setiap aktivitas dapat dipertanggungjawabkan kepada pimpinan dan pemangku kepentingan.

Efektivitas dan efisiensi dalam tata kelola administrasi pemeliharaan tercermin dari kemampuan organisasi dalam menggunakan sumber daya secara optimal tanpa mengurangi kualitas layanan. Penelitian oleh Lestari dan Fauzan (2022) menunjukkan bahwa penerapan prinsip good governance dalam pengelolaan fasilitas publik berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kinerja organisasi dan kepercayaan publik.

Digitalisasi Administrasi dan Sistem Informasi Pemeliharaan

Digitalisasi administrasi merupakan upaya modernisasi sistem kerja melalui pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan dokumen. Dalam administrasi pemeliharaan fasilitas, digitalisasi berperan penting dalam mempercepat proses pelaporan, meminimalkan kesalahan pencatatan, serta meningkatkan integrasi data antarunit kerja (Prasetyo & Ramadhan, 2021). Sistem administrasi berbasis digital juga memudahkan proses pengawasan dan evaluasi karena informasi dapat diakses secara real time.

Namun, implementasi digitalisasi administrasi di sektor publik seringkali menghadapi kendala, seperti keterbatasan infrastruktur, kesiapan sumber daya manusia, dan resistensi terhadap perubahan sistem kerja. Hal ini menegaskan bahwa digitalisasi administrasi tidak hanya memerlukan dukungan teknologi, tetapi juga perubahan budaya organisasi dan peningkatan kompetensi aparatur (Nugraha & Setiawan, 2023).

Interpretasi Penelitian Terdahulu dalam Konteks Penelitian

Berdasarkan kajian terhadap penelitian terdahulu yang tercantum dalam tabel landasan teori, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar penelitian sebelumnya menitikberatkan pada aspek tata kelola pelabuhan secara umum, pengelolaan arsip, audit sistem informasi, serta penerapan konsep green port. Penelitian Riyadi et al. (2021) menekankan pentingnya koordinasi antarlembaga dalam tata kelola pelabuhan, sementara Dimisyqiyan (2024)

menyoroti peran kompetensi sumber daya manusia dalam pengelolaan kearsipan pelabuhan.

Penelitian lain, seperti yang dilakukan oleh Bhakty dkk. (2024) dan Setyaningsih (2024), lebih fokus pada sistem informasi dan tata kelola logistik berkelanjutan. Meskipun relevan, penelitian-penelitian tersebut belum secara spesifik mengkaji tata kelola administrasi pekerjaan pemeliharaan fasilitas pelabuhan sebagai satu kesatuan proses administratif yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan. Dengan demikian, penelitian ini menempatkan diri sebagai upaya untuk melengkapi kajian sebelumnya dengan memberikan fokus khusus pada praktik tata kelola administrasi pemeliharaan fasilitas di lingkungan pelabuhan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif untuk memahami secara mendalam tata kelola administrasi pekerjaan pemeliharaan fasilitas di Pelabuhan Benoa, Badung, Bali. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggali proses, makna, serta dinamika praktik administrasi yang berlangsung dalam konteks organisasi secara alamiah dan kontekstual (Creswell & Poth, 2019; Tracy, 2020). Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya menelaah bagaimana mekanisme administrasi pemeliharaan dijalankan, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaannya di lingkungan pelabuhan.

Penelitian dilaksanakan di Pelabuhan Benoa yang dikelola oleh PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Sub Regional Bali Nusra. Informan penelitian ditentukan secara purposive dengan mempertimbangkan keterlibatan langsung dalam kegiatan pemeliharaan fasilitas dan pengelolaan administrasinya. Informan terdiri dari delapan orang, meliputi satu manajer teknik, dua junior manajer, serta lima staf teknis dan administrasi. Pemilihan informan tersebut didasarkan pada prinsip kecukupan dan kekayaan informasi (*information-rich cases*), sehingga data yang diperoleh mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai praktik tata kelola administrasi dari berbagai level organisasi (Guest et al., 2023; Yin, 2022).

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk mengamati secara langsung alur kerja administrasi pemeliharaan fasilitas serta pola koordinasi antarunit kerja. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur agar informan dapat menyampaikan pengalaman, pandangan, serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan administrasi pemeliharaan secara lebih terbuka dan mendalam (Flick, 2020). Dokumentasi digunakan untuk menelaah dokumen pendukung, seperti standar operasional prosedur, laporan pemeliharaan, serta arsip administrasi yang relevan dengan fokus penelitian.

Analisis data dilakukan secara interaktif dan berkesinambungan sejak tahap awal pengumpulan data. Proses analisis meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Reduksi data dilakukan dengan memilah, memfokuskan, dan menyederhanakan data sesuai dengan tema penelitian, sedangkan penyajian data disusun dalam bentuk narasi analitis untuk memudahkan peneliti dalam mengidentifikasi pola dan hubungan antarfenomena. Penarikan kesimpulan dilakukan secara bertahap dengan terus

melakukan verifikasi terhadap data lapangan agar hasil penelitian tetap konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan (Miles et al., 2020; Sugiyono, 2021).

Keabsahan data dijaga melalui teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari informan pada level jabatan yang berbeda, sedangkan triangulasi metode dilakukan dengan mencocokkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selain itu, peneliti juga melakukan pengecekan ulang hasil wawancara kepada beberapa informan untuk memastikan ketepatan interpretasi data dan mengurangi potensi bias peneliti (Hardani et al., 2020).

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, akses terhadap sebagian dokumen internal bersifat terbatas sehingga tidak seluruh data administratif dapat dianalisis secara mendalam. Kedua, cakupan penelitian hanya berfokus pada Pelabuhan Benoa sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan ke konteks pelabuhan lain. Ketiga, implementasi sistem digital administrasi yang masih parsial menyebabkan variasi praktik administrasi antarunit kerja. Meskipun demikian, keterbatasan tersebut tidak mengurangi kedalaman analisis, melainkan menjadi dasar bagi pengembangan penelitian lanjutan dengan cakupan dan pendekatan yang lebih luas.

HASIL PENELITIAN

Mekanisme Tata Kelola Administrasi Pemeliharaan Fasilitas

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola administrasi pekerjaan pemeliharaan fasilitas di Pelabuhan Benoa telah dilaksanakan melalui mekanisme kerja yang relatif sistematis. Proses administrasi dimulai dari identifikasi kondisi fasilitas oleh staf teknis, baik melalui inspeksi rutin maupun laporan dari unit operasional. Temuan lapangan menunjukkan bahwa setiap kerusakan atau kebutuhan pemeliharaan dicatat sebagai dasar penyusunan rencana kerja pemeliharaan.

Tahap perencanaan dilakukan dengan menyusun rencana kegiatan pemeliharaan yang mencakup jenis pekerjaan, kebutuhan material, serta estimasi waktu pelaksanaan. Rencana tersebut kemudian diajukan kepada atasan untuk memperoleh persetujuan. Setelah pekerjaan dilaksanakan, staf wajib menyusun laporan pemeliharaan yang memuat kondisi fasilitas sebelum dan sesudah pekerjaan, proses pelaksanaan, serta kendala yang dihadapi di lapangan. Laporan ini selanjutnya diverifikasi oleh pejabat yang berwenang sebagai bentuk pengawasan administratif.

Meskipun mekanisme administrasi telah berjalan sesuai standar operasional prosedur, hasil penelitian menemukan bahwa pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal. Beberapa laporan pekerjaan disusun secara manual dan disampaikan tidak tepat waktu, sehingga memperlambat proses evaluasi dan pengambilan keputusan. Selain itu, perbedaan format administrasi antarunit kerja menyebabkan data pemeliharaan belum terintegrasi secara menyeluruh.

Faktor Pendukung Pelaksanaan Pemeliharaan Fasilitas

Penelitian ini menemukan sejumlah faktor yang mendukung pelaksanaan pemeliharaan fasilitas di Pelabuhan Benoa. Faktor utama adalah adanya komitmen pimpinan dan pegawai dalam menjaga kondisi fasilitas pelabuhan

agar tetap layak operasional. Komitmen tersebut tercermin dari kepatuhan pegawai terhadap prosedur kerja serta kesediaan untuk tetap melaksanakan pemeliharaan meskipun menghadapi keterbatasan administratif.

Faktor pendukung lainnya adalah koordinasi antarunit kerja yang relatif berjalan dengan baik. Informasi mengenai kerusakan fasilitas dan kebutuhan pemeliharaan dapat disampaikan antarunit melalui komunikasi formal maupun informal. Selain itu, ketersediaan sumber daya manusia yang memahami aspek teknis dan administratif turut mendukung keberlangsungan kegiatan pemeliharaan fasilitas.

Faktor Penghambat Tata Kelola Administrasi Pemeliharaan

Di sisi lain, hasil penelitian juga mengidentifikasi sejumlah faktor penghambat dalam tata kelola administrasi pemeliharaan fasilitas. Hambatan utama terletak pada sistem administrasi yang belum sepenuhnya berbasis digital dan terintegrasi. Ketergantungan pada dokumentasi manual menyebabkan proses pencatatan dan pelaporan menjadi kurang efisien dan rentan terhadap keterlambatan.

Selain itu, perbedaan format administrasi antarunit kerja menyulitkan proses penggabungan data dan evaluasi secara menyeluruh. Keterbatasan pelatihan administrasi dan penggunaan sistem digital bagi sebagian pegawai juga menjadi kendala dalam meningkatkan kualitas dokumentasi pemeliharaan fasilitas.

Pembahasan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa tata kelola administrasi pemeliharaan fasilitas di Pelabuhan Benoa pada dasarnya telah mencerminkan prinsip dasar manajemen administrasi publik, khususnya dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan. Mekanisme administrasi yang diawali dengan identifikasi kondisi fasilitas dan diakhiri dengan laporan pekerjaan sejalan dengan pandangan Mardiasmo (2021) yang menekankan pentingnya siklus administrasi yang terdokumentasi dalam pengelolaan fasilitas publik.

Namun demikian, hasil penelitian ini juga memperkuat temuan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa kelemahan utama dalam pengelolaan administrasi publik sering terletak pada aspek integrasi sistem dan konsistensi dokumentasi. Amalia (2025) dan Dimisyqiyan (2024) menemukan bahwa perbedaan format administrasi dan keterbatasan digitalisasi menjadi faktor penghambat efektivitas pengelolaan arsip dan pelaporan di sektor kepelabuhanan. Kondisi serupa juga terlihat di Pelabuhan Benoa, di mana administrasi pemeliharaan masih didominasi oleh sistem manual.

Faktor pendukung berupa komitmen pegawai dan koordinasi antar unit kerja sejalan dengan temuan Riyadi et al. (2021) yang menegaskan bahwa koordinasi internal merupakan elemen penting dalam tata kelola pelabuhan. Komitmen organisasi yang kuat memungkinkan kegiatan pemeliharaan tetap berjalan meskipun sistem administrasi belum sepenuhnya optimal. Hal ini menunjukkan bahwa faktor sumber daya manusia masih menjadi modal utama dalam menjaga keberlangsungan pelayanan publik.

Di sisi lain, keterbatasan digitalisasi administrasi yang ditemukan dalam penelitian ini menguatkan hasil penelitian Bhakty et al. (2024) yang menyatakan bahwa sistem informasi yang belum terintegrasi akan berdampak pada

rendahnya transparansi dan akuntabilitas organisasi. Tanpa dukungan sistem administrasi berbasis data yang terintegrasi, proses evaluasi dan pengambilan keputusan manajerial menjadi kurang efektif.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa peningkatan tata kelola administrasi pemeliharaan fasilitas pelabuhan tidak hanya memerlukan penyempurnaan prosedur kerja, tetapi juga penguatan sistem administrasi digital, standarisasi format dokumentasi, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Temuan ini melengkapi penelitian terdahulu dengan memberikan gambaran empiris mengenai praktik administrasi pemeliharaan fasilitas di tingkat operasional pelabuhan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa tata kelola administrasi pekerjaan pemeliharaan fasilitas di Pelabuhan Benoa telah dilaksanakan dengan mengacu pada standar operasional prosedur yang berlaku dan mencakup tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta pelaporan kegiatan. Secara administratif, mekanisme kerja telah tersusun dengan cukup sistematis dan memungkinkan setiap kegiatan pemeliharaan untuk didokumentasikan serta dipertanggungjawabkan kepada manajemen.

Namun demikian, pelaksanaan tata kelola administrasi tersebut belum berjalan secara optimal. Hasil penelitian menunjukkan adanya keterlambatan penyampaian laporan pekerjaan, perbedaan format administrasi antarunit kerja, serta keterbatasan sistem administrasi yang belum sepenuhnya terintegrasi secara digital. Kondisi ini berdampak pada kurang optimalnya koordinasi antarunit dan keterpaduan data pemeliharaan fasilitas, sehingga proses evaluasi dan pengambilan keputusan manajerial belum sepenuhnya efektif.

Di sisi lain, keberlangsungan kegiatan pemeliharaan fasilitas di Pelabuhan Benoa didukung oleh komitmen pimpinan dan pegawai, ketersediaan sumber daya manusia yang memadai, serta kesadaran organisasi terhadap pentingnya menjaga kondisi fasilitas pelabuhan. Faktor-faktor tersebut menjadi modal utama dalam memastikan pemeliharaan fasilitas tetap berjalan meskipun masih terdapat keterbatasan dalam sistem administrasi yang digunakan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa peningkatan kualitas tata kelola administrasi pemeliharaan fasilitas pelabuhan memerlukan penguatan sistem administrasi yang terintegrasi, penyeragaman format dokumentasi, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Temuan ini memberikan kontribusi empiris dalam memperkaya kajian administrasi publik di sektor kepelabuhanan serta menjadi dasar bagi upaya perbaikan tata kelola pemeliharaan fasilitas yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, R. (2025). Efektivitas pengelolaan arsip pada termin konstruksi pembangunan pelabuhan di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Administrasi Publik*, 5(1), 47-53.
- Bhakty, T. E., Pratama, A., & Wijaya, R. (2024). Audit sistem informasi keuangan pada Pelabuhan Indonesia III. *Jurnal Sistem Informasi Publik*, 9(1), 55-67.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2019). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Sage Publications.

- Dimisyqiyani, E. (2024). Peran kompetensi arsiparis terhadap penyelenggaraan manajemen kearsipan pada Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 3 Sub Regional Jawa. *Jurnal Administrasi Publik*, 12(1), 77-90.
- Dwiyanto, A. (2020). *Manajemen pelayanan publik: Reformasi, tata kelola, dan inovasi*. Gadjah Mada University Press.
- Flick, U. (2020). *An introduction to qualitative research* (6th ed.). Sage Publications.
- Guest, G., Namey, E., & Mitchell, M. (2023). *Collecting and analyzing qualitative data at scale*. Sage Publications.
- Gunawan, H., & Lestari, D. (2022). Analisis efektivitas pemeliharaan fasilitas publik berbasis supervisi teknis. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(1), 55-66.
- Hardani, Auliya, N. H., Andriani, H., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. (2020). *Metode penelitian kualitatif dan kuantitatif*. Pustaka Ilmu.
- Hendrawan, B., & Fitriani, M. (2024). Pemanfaatan sistem digital dalam pemantauan kondisi fasilitas publik. *Jurnal Teknologi Pemerintahan*, 5(1), 15-27.
- Lestari, S., & Fauzan, M. (2022). Penerapan prinsip good governance dalam pengelolaan fasilitas publik daerah. *Jurnal Administrasi Negara*, 28(2), 145-158.
- Mardiasmo. (2021). *Otonomi dan manajemen keuangan daerah*. Andi Offset.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). Sage Publications.
- Nugraha, R., & Setiawan, D. (2023). Transformasi digital administrasi publik: Tantangan dan strategi implementasi. *Jurnal Reformasi Administrasi*, 10(1), 33-45.
- Prasetyo, A., & Ramadhan, F. (2021). Sistem informasi pemeliharaan fasilitas publik berbasis data terintegrasi. *Jurnal Sistem Informasi Pemerintahan*, 6(2), 89-101.
- Rahman, F., & Sari, M. (2023). Evaluasi penerapan prinsip akuntabilitas dalam administrasi publik. *Jurnal Kebijakan Administrasi Publik*, 8(2), 45-57.
- Riyadi, S. F., Muzwardi, A., & Darmawan, E. (2021). Tata kelola pelabuhan di Indonesia: Studi Kota Tanjungpinang. *KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 6(1), 17-25.
- Sugiyono. (2021). *Metode penelitian kualitatif*. Alfabeta.
- Sulistyarini, D. (2023). Administrasi pemeliharaan fasilitas publik: Tantangan dan inovasi tata kelola. *Jurnal Manajemen Publik*, 9(1), 55-68.
- Sutopo. (2019). *Administrasi publik: Teori dan praktik*. Lembaga Administrasi Negara.
- Tracy, S. J. (2020). *Qualitative research methods: Collecting evidence, crafting analysis, communicating impact* (2nd ed.). Wiley-Blackwell.
- Widodo, J., & Kurniawan, T. (2020). Manajemen infrastruktur publik dan keberlanjutan pelayanan. *Jurnal Manajemen Publik*, 7(1), 21-34.
- Yin, R. K. (2022). *Qualitative research from start to finish* (3rd ed.). Guilford Press.
- Yusuf, M., & Prabowo, H. (2021). Tata kelola pelabuhan dan implikasinya terhadap kinerja operasional. *Jurnal Transportasi dan Logistik*, 9(2), 112-124.